

Kronologis dan Pernyataan Sikap Tindakan Persekusi dan Diksriminasi Terhadap Mahasiswa Papua

Federasi KontraS Bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, mengecam keras tindakan sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang telah melakukan tindakan paksa pembubaran acara diskusi terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya dan Kota Malang.

Pada Minggu, 1 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bermaksud untuk menyelenggarakan diskusi dengan tema "Memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua", sekitar jam 15.20 Wib, kurang lebih 15 orang aparat gabungan Intelkam Polrestabes dan TNI, yang mengenakan pakaian sipil, mulai terlihat berada di sekitar luar halaman asrama Papua. Pada saat diskusi baru akan dimulai secara tiba-tiba sekitar pukul 17.15 Wib. Aparat gabungan tersebut mendobrak masuk pintu asrama yang terletak di Jl. Kalasan Surabaya, dimana kegiatan diskusi baru akan dimulai.

Kemudian terjadi perdebatan antara aparat dan pihak penyelenggara diskusi, pada saat terjadinya perdebatan kemudian salah satu anggota intel polrestabes menyampaikan kalimat "Periksa-periksa" kepada anggota yang lainnya. Kemudian salah satu dari anggota Intelkam Polrestabes Surabaya, mengambil Copyan materi diskusi dan melihat judul materi yang telah disiapkan oleh Pemantik (Step Pigai). Setelah membaca materi mereka menegaskan dengan kata-kata bahwa "*kami melarang Diskusi maupun Aksi yang bersifat menentang negara, dan diskusi ini sudah menentang negara, maka secara tegas kami membubarkan diskusi ini dan tidak usah ada lagi untuk melanjutkan, karena kalian berada didalam negara kesatuan NKRI*". Spontan adu mulut pun terjadi antara oknum intel tersebut dengan salah satu mahasiswa Papua peserta diskusi hingga situasinya mulai memanas. Peserta diskusi lainnya terpancing emosi sebab intel tersebut mengeluarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian.

Peserta diskusi yang hadir dalam kegiatan juga mendapatkan tekanan oleh gabungan aparat Intelkam Surabaya, untuk tidak melanjutkan diskusi. Ketika ditanyai apa alasan pelarangan tersebut oleh salah satu peserta diskusi, oknum tersebut menjawab bahwa; "*Topik diskusi berbau politik perjuangan Papua merdeka*". Tidak hanya itu, oknum dari pihak intelkam juga mengarahkan kami untuk mengantikan topik diskusi yang tidak bersifat menentang negara, katanya. Jika tidak atau masih di ada diskusi-diskusi serupa, maka tidak segan-segan mereka kembali dan membubarkan paksa. Di hari yang sama pembubaran paksa diskusi di Sekertariat IPMAPAPARA Malang.

Berikut uraian kronologis singkat:

- Minggu, 1 Juli 2018 pukul 16.00 Wib. Penghuni Kontrakan IPMAPAPARA didatangi oleh pihak RT dan Intel berpakaian preman. Mereka membawa himbauan (terlampir) yang intinya melarang dilaksanakannya kegiatan Nobar dan Diskusi sesuai seruan yang dipublis di Media Sosial Facebook dan Whatsap. Penghuni menerima himbauan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada kawan-kawan AMP, Musa Pekei dan Ferry Takimai. Namun himbauan tersebut tidak digubris panitia.
- Pada pukul 18.00 Wib: peserta diskusi sudah mulai berdatangan. Diskusi dimulai pada pukul 18.30 Wib dengan menonton bersama Film Sejarah Papua sebagai pengantar. Diskusi ini dipandu oleh Musa Pekei dan Yustus Yekusamon.
- Pada pukul 19.30 Wib, saat acara sedang berlangsung tiba-tiba datang rombongan Ormas bersama ketua RT. Mereka mencoba memasuki pintu pagar kontrakan kemudian dihadang oleh panitia keamanan (Yohanes dan Felle). Terjadi proses negosiasi antara mahasiswa dan perwakilan Ormas dan Intel. Tiba-tiba dua orang TNI masuk ke dalam kontrakan disusul preman serta intel dan memaksa kawan-kawan untuk keluar dan meninggalkan tempat diskusi. Namun peserta masih bertahan. Pada saat berlangsung negosiasi Yohanes dan Felle dipukul kemudian Yohanes diludahi di muka, dicaci maki. Perbuatan ini tidak dibalas oleh Yohanes dan Felle. Sementara itu aparat keamanan hanya menonton dan melakukan proses pembiaran.

- Pada pukul 19.40 Wib, Ormas TNI dan Polisi, mulai membanting pintu dan jendela kontrakan, secara brutal, dan memaksa memubarkan, serta memulangkan peserta diskusi dan mengiring peserta diskusi keluar kontrakan. Selanjutnya, melakukan pengrebeakan kamar-kamar dan menyita barang berupa Laptop 8 unit, 2 HP Opo, 2 HP Samsung, 1 Proyektor, dan barang-barang lainnya. Beberapa barang di dalam kontrakan dirusaki oleh Ormas.
- Pada pukul 20.00 Wib Yustus dan Yohanes diijinkan masuk ke dalam kontrakan dan melakukan negosiasi ulang dengan Intel, preman, ketua RT dan TNI agar mahasiswa meninggalkan kontrakan. Pindah secara paksa dengan alasan mengadakan diskusi Sejarah Perjuangan Papua. Namun mahasiswa Papua menolak dan akan tetap menetap di kontrakan itu. Mahasiswa Papua tersebut terus dipaksa untuk pindah. Mahasiswa Papua dan kelompok gabungan Ormas dan aparat keamanan saling berdebat. Mahasiswa Papua atas nama Yohanes dan Yustus diseret dan dipukuli keluar dari kontrakan.
- Pada pukul 21.00 Wib peserta diskusi yang masih berada di halaman kontrakan dipaksa keluar dari Kompleks Gang 8c dan 10 meter sebelum tiba di Jalan Raya Mt.Haryono. Beberapa dari mahasiswa Papua dipukuli. Salah satu anggota AMP kepalanya mengalami luka dan berdarah akibat pukulan benda tumpul oleh Intel, TNI, Polisi dan Ormas. Situasi ini memancing kemarahan mahasiswa yang lainnya, hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong. Setelah tiba di Jalan Raya Mt.Haryono terjadi kericuhan atau keributan antara aparat keamanan dan masa AMP.

Tindakan pembubaran paksa terhadap kegiatan diskusi yang dilakukan mahasiswa Papua di Surabaya dan Kota Malang tidak terjadi hari ini saja. Peristiwa ini merupakan tanda bahaya bagi masa depan demokrasi Bangsa Indonesia. Karena Negara Indonesia mengabaikan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan ***“memberikan hak setiap warga atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”***.

Peristiwa ini menggambarkan rezim yang saat ini berkuasa cenderung mengabaikan salah satu prinsip paling pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan berpendapat. Pihak kepolisian telah menerapkan cara yang salah dan melanggar prinsip HAM dalam menjamin perlindungan atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Berdasarkan uraian di atas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, mendesak agar:

1. Kepolisian Republik Indonesia melakukan evaluasi atas sikap, tindakan dan perilaku aparat dibawahnya yang secara jelas dan nyata anti-demokrasi, melanggar konstitusi, dan menyetepkan hak warga untuk berkumpul dan berekspresi.
2. Menuntut Pemerintah Jokowi untuk memastikan Perlindungan HAM dan pemenuhan keadilan kepada Rakyat Papua.
3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak terseret dalam konflik horizontal dengan pemuda papua. Sesungguhnya komunitas Papua sedang menyuarakan keadilan bagi rakyat Papua, karena itu selayaknya seluruh rakyat Indonesia mendukung suara rakyat Papua.

Surabaya, 02 Juli 2018

Sekjend Federasi KontraS

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya

Andy Irfan J

Fatkul Khoir